

PENANGANAN MASALAH INTEGRAL

Oleh Prof Dr. H. Abd. Majid, M.A.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia

Tulisan ini antara lain saya maksudkan bagian dari tanggapan tulisan Benni Setiawan, selanjutnya saya singkat BS, yang dimuat oleh harian umum Pikiran Rakyat pada hari Jumat, 19/2/2010 halaman 26. Tulisan itu sebagai (1) ungkapan keprihatinannya kepada beberapa daerah, bukan hanya di daerah Jawa Barat, yang terkena musibah banjir dan longsor, (2) ajakan para pemuka agama untuk turut serta secara aktif menangani musibah banjir dan longsor. Itu bagus. Tetapi dari segi judul tidak baik dan tidak tepat. Alasan saya yang *pertama*, mengesankan seolah-olah pemuka, yang menurut istilah BS agamawan, seolah-olah tidak memiliki kepedulian terhadap ekosistem, musibah, dan penderitaan yang dialami oleh mereka yang tertimpa musibah banjir dan longsor. Sementara BS sendiri mengutip terjemahan Alquran surah al-Raum/30:41, yang justeru ayat dan terjemahannya tersebut itulah dan sejenisnya yang sangat sering dikemukakan oleh para penceramah agama Islam di berbagai tempat dan keadaan. Jadi, saya aneh dengan judul tulisan itu.

Kedua, seolah-olah masalah terjadinya banjir dan longsor menunggu perlunya ada fatwa. Peristiwa ini bisa saja teguran Allah *Rabb al-`alamin* yang menciptakan alam ini sedemikian harmonis, tetapi, seperti ayat di atas, menggambarkan dan ini yang nyata, banyak di antara kita yang semakin serakah, merusak hutan dengan menebangi pepohonannya, menggali perut bumi tanpa

memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan, kepentingan, dan keselamatan orang banyak, dan selainnya.

Ketiga, BS terekesan mempersamakan istilah agama dengan agamawan, sebagaimana saya kutipkan pada alinea terakhir tulisannya, BS mengatakan “Sudah saatnya agama dan kaum agamawan turut serta menjadi penjaga alam dari kerusakan. Mereka merupakan harapan bagi masyarakat yang konon religius dalam menjaga makro dan mikrokosmos bumi. Tanpa kesadaran kaum agamawan, banjir dan tanah longsor akan terus menjadi agenda tahunan. Pada akhirnya, umatlah yang akan menjadi korban. Wallahualam”. Agama tidak boleh dan jangan disamakan dengan agamawan. Memang terkadang sulit membedakan antara ajaran dengan pemeluknya. Bila yang dimaksud Islam, maka Islam berasal dari Allah swt sebagaimana yang diterima, disampaikan, dan ditauladankan oleh baginda Rasulillah saw. Sementara agamawan adalah—mungkin yang dia maksudkan adalah pemuka agama Islam, karena BS menyebut-nyebut legislator yang pada waktu pemilu banyak menggunakan simbol atau atribut agama—adalah manusia biasa yang derajat, kualitas, dan perilakunya masih sangat jauh di bawah rasul-Nya. Contoh tulisan seperti ini saya sering dengar dan temukan di tempat-tempat lain, misalnya, agama di persimpangan jalan. Agama tidak menyimpang dan jangan dipersalahkan melainkan yang salah atau keliru adalah pemeluk-pemeluknya, tak terkecuali mereka yang dianggap atau menganggap dirinya sebagai pemuka agama. Juga sering sering ada pernyataan atau himbuan dari para pejabat untuk mengajak pemuka agama mengajak pemberantasan korupsi, misalnya, padahal setiap kali pemuka agama Islam ceramah, khutbah atau diskusi selalu mengingatkan

untuk beriman, bertqwa, dan berakhlak mulia, jujur, adil. Jika ada orang yang korupsi bukan lagi wewenang pemuka agama tetapi berpindah kepada tugas penegak hukum atau pihak yang diberi kewenangan untuk itu. Pernyataan seperti itu tidak proporsional.

Keempat, ini merupakan salah satu contoh konkret manakala ada suatu keadaan yang negatif muncul maka yang dibawa-bawa ialah apa peran, bagaimana kiprah, apa solusinya dari pemuka agama? Ketika sudah keadaan normal dan masalahnya sudah selesai para pemuka agama tidak pernah diajak bicara untuk memberikan pemikiran-pemikiran atas masalah bangsa. Seringkali kita mendengar perkataan orang bila terjadi sesuatu ini bukan masalah agama. Kenapa agama yang diposisikan Allah swt sebagai panduan universal tetapi oleh kita dipersempit? Pikiran dan perilaku itulah yang disebut *secular*. Kita tidak senang dengan istilah itu tetapi itu banyak melekat pada diri sendiri.

Dan yang *kelima*, tidak jelas statusnya, apakah kutipan dari yang diambilnya dari David Bryce-Smit atautkah BS sendiri yang menyatakannya bahwa, “Mengapa agamawan? Hal ini karena mereka merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan “tradisional”. Dengan sentuhan agama, seseorang akan mudah disadarkan bahwa eksploitasi alam akan mendatangkan kerusakan di muka bumi. Dengan agama pula, seseorang mempunyai kesadaran kritis untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Karena agama masih menjadi “panduan suci” dalam setiap aktivitas umat manusia”. Kutipan atau pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa agama hanya diperuntukkan bagi mereka yang tardisional. Ada suatu kenyataan yang saya sering perhatikan

kehidupan orang-orang yang tinggal di desa, kampung, jika mau menebang pohon atau membabat rumput saja harus ada upacara sesajen meminta dan menyembah kepada yang “empunya” pohon dan rumput itu. Ekosistem, harmonisasi, dan ekologi betul-betul mereka jaga dan pelihara. Tetapi orang dari kota yang mengklaim dirinya sebagai orang pintar, modern datang ke hutan, mendaki gunung. Hutan dibabat, gunung digunduli. Jadi siapa sebenarnya yang modern dan berkeadaban. Orang kampungkah atau orang kota?

Termasuk tanda petik kedua “panduan suci” bila dilihat sudut kaidah penulisan menunjukkan semisal atau disepertikan. Manakala hal ini dihubung-hubungkan atau menghubungkannya dengan agama Islam jelas-jelas pernyataan ini bertentangan. Karena Islam yang bersumber dari kitab suci Alquran jelas sekali statusnya, dia adalah *hudan* dan *hudan* di situ bukan datang dari pejabat atau manusia biasa, melainkan dari Allah swt, Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk. Agama adalah petnjuknya Yang Menguasai dan menciptakan jagad raya ini. Ia merupakan adalah petunjuk manusia tetapi manusia lebih sering datang ke orang atau tempat tertentu untuk meminta petunjuk. Sikap dan perbuatan ini, oleh Muhammad Qutb dengan jahiliyah modern, seperti dalam kitabnya *Jahiliyyah al-Qarn al-`Isyirin*. Bahwa perilaku jahiliyah bisa dan terjadi di mana saja dan kapanpun.

Dari apa yang saya pahami dari tulisan BS itu, saya mau menyampaikan beberapa hal. *Pertama*, bila menyampaikan pendapat hendaknya kita pahami secara proporsional, tulisan ini dtujukan kepada. Kasus penanganan banjir dan longsor yang

dikemukakan sebagai contoh dalam tulisan itu, adalah urusan pemerintah, misalnya, bagian perizinan, tata kota, pertanahan, kependudukan, sosial, transmigrasi, dan penegak hukum. Pengusaha yang banyak mengeksploitasi alam. Ini urusan antara penguasa dengan pengusaha. Demikian halnya pihak pemerintah melibatkan berbagai ahli dari Perguruan Tinggi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, adalah kesadaran masyarakat luas untuk menaati peraturan-peraturan masalah lingkungan dan keadaan daerah apakah di tempat itu aman atau tidak, misalnya. Umumnya *kan* mereka terkena musibah mengatakan ini sudah biasa, langganan banjir. Mereka tidak mau pindah. Ini *kan* menyangkut sikap dan perilaku yang harus dirubah. Berapa banyak daerah atau kawasan di negeri kita yang kekurangan penduduk bahkan ada pula yang tidak berpenghuni.

Di kota-kota besar di dalam negeri kita seperti di Bandung ini, sudah *mafhum* bahwa populasi penduduk tidak pernah menyusut tapi malah sebaliknya. Penanganan masalah musibah yang terjadi karena faktor alam, jangan hanya memainkan solusi itu-itu lagi yakni ada subsidi, bantuan sosial, masalah HAM, tetapi juga relokasi dan transmigrasi. Memang pertanyaannya ialah mengapa orang lebih mengejar hidup di kota dari pada di desa walau tidak punya modal untuk berusaha, ilmu dan keterampilan juga tidak punya. Yang penting tinggal di kota. Pada hal lahan semakin sempit dan hidup kian terhimpit.

Kedua, perlu ada kendali dan penanganan yang integral antara institusi pemerintah dan masyarakat. Kita bisa lihat banyak sekali tempat atau lahan yang tadinya sawah, empang telah berubah

menjadi kompleks perumahan, perindustrian. Apakah ada koordinasi antara satu pengembang dengan pengembang yang lainnya untuk menangani saluran pembuangan air dan bagaimana pula pengawasan pemerintah setempat, berjalan atau tidak? Saya tidak tahu.

Ketiga, pemuka agama jangan terlalu diandalkan, karena pada umumnya kekuatan mereka hanya terletak pada lisan dan pemikirannya. Itupun hanya mereka yang “terpakai” saja oleh pemerintah sehingga orang-orang itu lagi dan hanya ditempatkan sebagai tukang panjat atau baca doa. Pandangan ini juga harus dirubah. Bahwa tidak semua mereka yang mengerti agama bukan hanya bisa seperti itu.

Keempat, jangan lagi kita mempunyai ilmu, pandangan, dan sikap yang hanya sepihak, parsial melainkan harus integral dan komprehensif dalam melihat dan menangani masalah. Memang ada kenyataan sekarang kita seolah-olah semakin pandai membagi-bagi pekerjaan tetapi semakin sulit untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi. Diperparah lagi dengan sikap bahwa itu bukan tanggungjawab saya, bukan wewenang saya.

Hidup dan kehidupan ini tidak ada yang sendirian dan berdiri sendiri. Bukankah kita sering mengikuti kata-kata Presiden kita, bersama kita bisa. Lanjutkan! Jangan hanya pandai mengucapkannya tapi buktikan! Masyarakat butuh bukti bukannya janji atau bicara. Bagaimana jika kita mengatakan sesuatu yang pernah kita lakukan dari pada mengatakan sesuatu yang akan dilakukan. Itu namanya janji, cita-cita yang belum terlaksana.